

**PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN MASJID AL AKBAR SURABAYA
(Strategi Adaptasi PKL Anggota Paguyuban PKL Makmur Pagesangan Untuk Tetap
Berjualan Di Lingkungan Masjid Al Akbar Surabaya)**

Bagus Fajar F.

bagusfajar88@yahoo.co.id

Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga

Abstrak

Ramainya pengunjung Masjid Al Akbar Surabaya membuat banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area masjid tersebut. Salah satu kelompok PKL yang ada adalah Paguyuban PKL Makmur yang dikelola warga Pagesangan dan menempati di lahan kosong seluas 10.962 meter persegi yang berada 200 meter di sebelah utara Masjid Al Akbar Surabaya. Lahan tersebut adalah lahan milik pemerintah kota yang diamanatkan kepada Masjid Al Akbar Surabaya. Keberadaan Paguyuban PKL Makmur Pagesangan ini mengalami banyak sekali permasalahan, utamanya terkait dengan status lahan milik Pemkot yang diamanatkan kepada Masjid Al Akbar Surabaya tersebut. Berbagai masalah tersebut ini ditengarai sebagai upaya manajemen untuk merebut pengelolaan PKL di lahan tersebut yang dipegang oleh warga Paguyuban PKL Makmur Pagesangan. Karena sejak adanya PKL tersebut, tempat ini selalu ramai dan mampu mengundang banyak pengunjung, bahkan banyak pedagang yang memilih bergabung ke Paguyuban PKL Makmur Pagesangan karena tempatnya lebih nyaman.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dan bisa tetap bertahan di lokasi berjualan di lahan kosong sisi utara masjid, strategi yang diterapkan oleh para PKL anggota Paguyuban PKL Makmur Pagesangan salah satunya adalah dengan melakukan perlawanan, dengan ngotot mempertahankan dagangannya, dengan menjebol pagar seng yang dipasang, maupun dengan memindahkan pintu yang digembok tanpa merusak gembok yang dipasang. Strategi adaptasi lain, dilakukan dengan menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan sosial yang telah membentuk suatu jaringan sosial. Jaringan sosial ini merupakan strategi adaptasi yang paling efektif dari para PKL untuk tetap berjualan di lahan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa hampir semua penyelesaian dari permasalahan yang ada diserahkan sepenuhnya oleh para PKL kepada pengurus Paguyuban PKL Makmur.

Kata Kunci: strategi adaptasi , pedagang kaki lima

Abstract

Crowded visitors of Masjid Al Akbar Surabaya is make a lot of street vendors who trade in the mosque area. One of a group of street vendors there are exist is Paguyuban PKL Makmur that run by Pagesangan resident and and occupy on vacant land area of 10.962 square meters which is located 200 meters on the north side of Masjid Al Akbar Surabaya. The land is owned by a city government that mandated to the Masjid Al Akbar Surabaya. Existence of Paguyuban PKL Makmur Pagesangan has experienced a lot of problems, mainly about the status of land owned by the city government's that mandated to the Masjid Al Akbar Surabaya. Various the issue is indicates as management efforts to seize management of street vendors on the land held by Paguyuban PKL Makmur Pagesangan. Because since the existence of these street vendorss, this place is always crowded and capable to attracting more visitors, even many vendorss who chose joined to Paguyuban PKL Makmur Pagesangan because of its more comfortable place.

In dealing with the various problems that occurs and can remain trade in the empty land of north side of mosque, strategy implemented by the street vendors members of the Paguyuban PKL Makmur Pagesangan one of them is by performing resistance, a stickler for maintaining their goods, and broke the fence, which installed zinc or to move the door locked without damaging a mounted. Adaptation strategies are done with the creation, develop and maintain social relationships have established a social network. Social networking this is the strategy that most effective to keep it from the street treader to trade in these area. This was evidenced by the fact that almost all settlement of the existing problems be fully surrendered by the street vendors to the coordinator of Paguyuban PKL Makmur.

Keywords: *adaptation strategy , street vendors*

Pendahuluan

Sejalan dengan besarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah pengangguran di kota Surabaya juga meningkat pesat. Hal ini disebabkan berbagai permasalahan seperti, rendahnya tingkat keterampilan (*skill*) dari masyarakat masyarakat desa yang pindah ke kota Surabaya atau juga adanya masyarakat yang menganggur karena di PHK-kan oleh perusahaannya meskipun mempunyai keterampilan (*skill*) yang memadai. Hingga pertengahan 2013 saja, dari sekitar 3 juta penduduk Surabaya tersebut, tercatat sebanyak 80.568 warga tidak memiliki

pekerjaan. Terdapat juga tambahan pengangguran dari kalangan perempuan. Jumlah ibu rumah tangga yang tidak bekerja sebesar 542.998 orang dan pelajar atau mahasiswa 462.738 orang. Jumlah seluruhnya sekitar 1,7 juta orang. Sehingga lebih dari separuh penduduk Surabaya ini belum bisa dikategorikan mandiri dan masih bergantung pada orang lain (ekbis.sindonews.com, 2013).

Dengan banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh pekerjaan atau gagal mencari peluang usaha, salah satu jalan yang mereka tempuh adalah membuka usaha menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan modal dan keterampilan yang

minim. PKL ini muncul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat (kecil) yang tidak mampu mendapatkan penghasilan. Keberadaan mereka semakin menjamur terutama di obyek-obyek vital perkotaan. PKL merupakan alternatif pekerjaan yang terbilang mudah dan tetap bertahan sampai saat ini. Keberadaannya seringkali juga kurang diperhatikan, padahal dalam kenyataannya kegiatan ekonomi informal ini cukup penting dalam menopang perekonomian rakyat. Bagi masyarakat berpenghasilan kecil keberadaan PKL sangat dibutuhkan karena yang bisa menyediakan produk dengan harga terjangkau.

Lokasi PKL sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para PKL, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para PKL berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan PKL belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit (Hidayat, 1978 dalam Suriatmi, 2005). Namun, pada umumnya PKL kurang memperhatikan masalah lingkungan dan faktor *hygiene* sebagai produk sampingan yang negatif. Masalah lingkungan berkaitan erat dengan kepadatan, misalnya kepadatan lalu lintas

maupun kepadatan tempat. Kondisi inilah yang seringkali menjadi alasan mengapa PKL selalu dianggap sebagai permasalahan, baik kebersihan maupun kemacetan serta menjadi persoalan serius di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Surabaya.

Salah satu lokasi yang dianggap strategis dan ramai dijadikan tempat berjualan oleh PKL di kota Surabaya adalah kawasan sekitar Masjid Al Akbar Surabaya. Masjid nasional ini terletak di bagian selatan kota Surabaya, tepatnya di daerah Pagesangan, dekat dengan jalan tol Surabaya-Gempol. Berbagai keindahan dan keunikan yang dimiliki masjid Al Akbar ini membuatnya menjadi salah satu tujuan utama wisata religi di Surabaya, dan tidak pernah sepi dari pengunjung atau wisatawan, terlebih pada hari libur. Hal ini tentu sedikit aneh bagi banyak orang yang berpandangan bahwa masjid hanya sebagai tempat beribadah. Namun kenyataannya, masjid Al Akbar memang telah menjadi destinasi wisata terkenal di Surabaya. Masjid Nasional Al Akbar memang terbuka untuk umum, bahkan bagi seorang non muslim sekalipun, boleh juga berkunjung. Ramainya jumlah pengunjung di Masjid Al Akbar inilah yang kemudian menarik minat pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di sekitar area Masjid Al Akbar Surabaya.

Keberadaan para pedagang kaki lima di sekitar area masjid Al Akbar tersebut ternyata juga dibutuhkan oleh para pengunjung masjid, terbukti dengan larisnya dagangan yang mereka jajakan. Setiap hari, para PKL yang diwawancarai penulis menyebutkan bahwa omzet mereka berkisar antara 300 hingga 800 ribu rupiah, yang sedikit banyak bergantung dari kondisi cuaca. Bahkan di berbagai alamat *website* yang merekomendasikan Masjid Al Akbar Surabaya sebagai tujuan wisata seringkali menyebutkan bahwa di Masjid Al Akbar Surabaya seorang pengunjung bisa mencoba bermacam kuliner atau bisa hanya sekedar “nongkrong” di kawasan tersebut, karena di sekeliling masjid banyak yang berjualan selayaknya pasar malam. Khusus pada minggu pagi di beberapa jalan ditutup dikhususkan untuk orang-orang yang berolah raga. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan PKL telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Masjid Al Akbar.

Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di Masjid Al Akbar ini, seperti PKL-PKL di tempat lain, dianggap menjadi masalah. Keberadaan mereka dianggap mengganggu keindahan, ketertiban dan kebersihan lingkungan masjid, bahkan seringkali juga dianggap mengganggu kekhusyukan orang yang beribadah di Masjid Al Akbar tersebut. Hal ini kemudian

beberapa kali menimbulkan konflik antara PKL dengan manajemen Masjid Al Akbar Surabaya. Pihak manajemen Masjid Al Akbar Surabaya beberapa kali telah membuat laporan kepada kepolisian terkait keberadaan PKL Pagesangan yang dikelola warga setempat karena dianggap mengganggu kekhidmatan umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Akbar.

Adanya laporan-laporan dari pihak manajemen tersebut, menurut Ketua Paguyuban PKL Makmur (P2KLM) membuat para PKL tak habis mengerti. Sebab setelah mereka ditertibkan kini sudah tak berjualan lagi di badan jalan sehingga tak mengganggu lalu lintas dan jamaah Masjid Al Akbar Surabaya. Alasan yang dijadikan bahan laporan ke polisi ini dinilai juga terlalu mengada ada. Sebab selain para PKL yang ada di sentra PKL belakang Masjid Al Akbar Surabaya ini masih ada lagi sentra PKL lainnya yang ada di jalan depan Masjid Al Akbar Surabaya. Hanya saja para PKL yang ada di depan Masjid Al Akbar Surabaya ini justru merupakan binaan dari Masjid Al Akbar Surabaya sendiri meskipun menempati fasilitas umum. Gedung serbaguna yang ada di dalam masjid juga disewakan untuk umum seperti resepsi pernikahan, tapi tidak dianggap mengganggu kekhusyukan (www.surabayakita.com, 2011).

Teori

Sektor Informal

Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Namun, menurut Safaria,dkk (2003) kalangan akademisi masih memperdebatkan teori dan konsep mengenai sektor informal ini. Ada yang menganggap bahwa sektor informal muncul karena terbatasnya kapasitas industri-industri formal dalam menyerap tenaga kerja yang ada, sehingga terdapat kecenderungan bahwa sektor informal ini muncul di pinggiran kota besar. Sebagian yang lain menganggap bahwa sektor informal ini sudah lama ada. Ini adalah pandangan dari perspektif yang “dualistik”, yang melihat sektor ”informal” dan “formal” sebagai dikotomi antara model ekonomi tradisional dan modern.

Menurut Safaria, dkk (2003) sektor informal dipandang sebagai kekuatan yang semakin signifikan bagi perekonomian lokal dan global, seperti yang dicantumkan dalam pernyataan visi WIEGO (*Woman In Informal Employment Globalizing and Organizing*) yaitu mayoritas pekerja di dunia kini bekerja di sektor informal dan proporsinya terus membengkak sebagai dampak dari globalisasi: mobilitas capital, restrukturisasi produksi barang dan jasa, dan deregulasi pasar tenaga kerja

mendorong semakin banyak pekerja ke sektor informal.

Menurut Hart (dalam Manning, 1991) mereka yang terlibat dalam sektor informal pada umumnya miskin, kebanyakan dalam usia kerja utama (*prime age*), berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum, modal usaha rendah, serta sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal. Menurut Breman (dalam Manning, 1991) sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: padat karya, tingkat produktivitas yang rendah, pelanggan yang sedikit dan biasanya miskin, tingkat pendidikan formal yang rendah, penggunaan teknologi menengah, sebagian besar pekerja keluarga dan pemilik usaha oleh keluarga, gampangnya keluar masuk usaha, serta kurangnya dukungan dan pengakuan pemerintah.

Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi angka pengangguran. Tidak sebandingnya antara lapangan pekerjaan dengan angka para pencari kerja menyebabkan sebagian masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sektor informal tersebut tidak membutuhkan syarat-syarat keahlian dan modal yang tinggi (Maryatmo

dan Susilo, 1996) serta tidak terikat dengan waktu dan tempat (Kurniadi dan Tangkilisan, 2001). Kehadirannya pun sering menyalahi aturan penataan ruang publik.

Menurut Alisyahbana (2005) berdasarkan penelitiannya di kota Surabaya telah mengkategorikan pedagang kaki lima menjadi 4 tipologi. Keempat tipologi tersebut adalah: 1) Pedagang kaki lima murni, yang masih bisa dikategorikan pedagang kaki lima adalah dengan skala modal terbatas, dikerjakan oleh orang yang tidak mempunyai pekerjaan selain pedagang kaki lima, ketrampilan terbatas, tenaga kerja yang bekerja adalah anggota keluarga. 2) Pedagang kaki lima yang hanya berdagang ketika ada bazar (pasar murah/pasar rakyat, berjualan di Masjid pada hari Jumat, halaman kantor-kantor). 3) Pedagang kaki lima yang sudah melampaui ciri pertama dan kedua, yakni pedagang kaki lima yang telah mampu mempekerjakan orang lain. Ia mempunyai karyawan, dengan membawa barang dagangannya dan peraganya dengan mobil, dan bahkan ada yang mempunyai stan lebih dari satu tempat. Termasuk dalam tipologi ini adalah pedagang kaki lima yang berpindah-pindah tempat dengan menggunakan mobil bak terbuka. 4) Pedagang kaki lima yang termasuk pengusaha kaki lima. Mereka hanya

mengkoordinasikan tenaga kerja yang menjualkan barang-barangnya. Termasuk pedagang kaki lima jenis ini yaitu pedagang kaki lima yang mempunyai toko, dimana tokonya berperan sebagai grosir yang menjual barang dagangannya kepada pedagang kaki lima tak bermodal dan barang yang diambil baru dibayar setelah barang tersebut laku.

Adaptasi

Menurut Kaplan (2002) adaptasi merupakan satu dari dua konsep sentral dalam teori ekologi budaya. Suatu ciri dalam ekologi budaya adalah perhatian mengenai adaptasi pada dua tataran: pertama, sehubungan dengan cara sistem budaya beradaptasi terhadap lingkungan totalnya, kedua, sebagai konsekuensi adaptik sistemik itu perhatian terhadap cara institusi dalam suatu budaya beradaptasi atau saling menyesuaikan diri. Umumnya ekologi budaya menekankan dipentingkannya proses adaptasi akan memungkinkan kita dapat melihat cara kemunculan, pemeliharaan, dan transformasi berbagai konfigurasi budaya.

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi (Gerungan,

1991). Adaptasi sendiri memiliki beberapa macam yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi kultural (Soemarwoto, 2004). Pada penelitian ini digunakan konsep dari adaptasi kultural. Adaptasi kultural adalah adaptasi dalam bentuk kelakuan yang dilakukan individu terkait pranata sosial-budaya di sekitarnya.

Menurut Vayda dan Rappaport dalam Mulyadi (2007) dikutip oleh Sugihardjo, dkk (2012), adaptasi manusia dapat dilihat secara fungsional dan prosesual. Adaptasi fungsional merupakan respon suatu organisme atau sistem yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi stabil (homostatis). Sedangkan adaptasi prosesual merupakan sistem tingkah laku yang dibentuk sebagai akibat dari proses penyesuaian manusia terhadap perubahan-perubahan lingkungan disekitarnya.

Strategi adaptasi lain, dilakukan dengan menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan sosial yang telah membentuk suatu jaringan sosial. Mitchel (1969) yang dikutip oleh Fachrina, dkk. (2010), menyatakan bahwa jaringan sosial merupakan seperangkat hubungan khusus yang terbentuk diantara sekelompok orang. Pemanfaatan jaringan sosial merupakan hal yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat miskin untuk mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi jaringan sosial adalah

untuk memudahkan anggota-anggotanya memperoleh akses ke sumber daya ekonomi yang tersedia di lingkungannya. Jaringan sosial dapat dibentuk berdasarkan basis kerabat, tetangga, pertemanan, atau campuran dari unsur-unsur tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk faktor-faktor yang mendorong para PKL untuk berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya dan Bagaimanakah strategi adaptasi dari para PKL untuk tetap dapat berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi dan data yang jelas serta terperinci mengenai strategi adaptasi pedagang kaki lima di sekitar Masjid Al Akbar Surabaya, serta melihat secara langsung kegiatan berjualan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut.

Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive* atau sengaja, karena secara

langsung penelitian ini berlokasi Masjid Al Akbar Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Pemanfaatan Masjid Al Akbar Surabaya dengan pertimbangan karena masjid Al Akbar merupakan tempat ibadah dan menjadi tempat wisata religi yang banyak dikunjungi orang, yang kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima untuk berjualan di lokasi tersebut.

Pada penelitian ini, penentuan informan ditentukan secara *purposive* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dapat membantu proses penelitian. Informan adalah orang yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.. Adapun kriteria yang digunakan peneliti dalam menentukan informan adalah:

1. Pedagang Kaki Lima Murni
2. Telah berjualan lebih dari 2 tahun di kawasan Masjid Al Akbar Surabaya
3. Aktif berjualan dan tergabung dalam Paguyuban PKL Makmur Pagesangan

Selain itu, peneliti juga menggunakan *Snowball Sampling* (bola salju) untuk menentukan informan. Dengan teknik ini, peneliti digiring berdasarkan data dari informan satu ke informan lainnya hingga data yang didapatkan mencukupi. Maksud mencukupi yaitu data yang didapatkan sudah mencapai titik jenuh atau sama.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan cara observasi dan wawancara mendalam (*Depth Interview*). Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dalam bentuk rekaman informan ditranskrip terlebih dahulu ke dalam sebuah catatan. Kemudian data hasil transkrip wawancara, observasi, internet, buku, dan jurnal diolah untuk dikelompokkan untuk mempermudah proses memasukkan data sesuai permasalahan penelitian. Setelah itu data dapat dikategorisasi untuk selanjutnya dilakukan analisis atas data tersebut. Analisis data kemudian dilakukan berdasarkan kategorisasi dan fokus masalah dalam penelitian, yaitu untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong para PKL untuk berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya dan strategi adaptasi dari para PKL untuk tetap dapat berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya tersebut.

Pembahasan

Seperti layaknya kawasan wisata religi yang lain, ramainya pengunjung Masjid Al Akbar tersebut juga membuat banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area masjid tersebut. Awalnya, para PKL bahkan berjualan di area sekitar masjid dan berada di bawah pengelolaan

langsung manajemen Masjid Al Akbar Surabaya. Tenda-tenda yang digunakan bahkan disediakan oleh pihak manajemen Masjid Al Akbar dengan pembayaran sewa tempat dan tenda dengan sistem infaq. Pada tahun 2005, Bapak Bambang DH, walikota Surabaya pada waktu itu, melarang para PKL berjualan di area Masjid Al Akbar. Akibatnya banyak PKL yang kemudian berhenti berjualan dan menganggur. Selain itu banyak juga yang tetap berjualan dan menjadi PKL “liar” di kawasan tersebut. Kondisi ini berlangsung sekitar 5 tahun hingga tahun 2010. Dimulai dengan didirikannya sentra PKL Gayungan oleh pihak Pemkot, para PKL mulai kembali dapat berjualan dengan tenang. Selain itu pihak masjid juga masih tetap mengelola PKL disekitar area sekitar Masjid Al Akbar.

Namun meski telah dibuatkan sentra PKL, tetap saja masih banyak PKL yang berjualan di jalan dan trotoar sekitar Masjid Al Akbar. Melihat hal tersebut, Ibu Siti Rumiati, warga Pagesangan yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Jawa Timur, berinisiatif untuk mengelola PKL yang masih “liar” dan menempatkannya di lahan kosong seluas 10.962 meter persegi yang berada 200 meter di sebelah utara Masjid Al Akbar Surabaya. Lahan tersebut adalah lahan milik pemerintah kota yang diamanatkan kepada Masjid Al Akbar

Surabaya dan biasa digunakan sebagai lahan parkir jamaah pada saat ada kegiatan-kegiatan besar di Masjid Al Akbar.

Pengelolaan PKL di lahan tersebut dilakukan dengan alasan untuk membuka lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan baik warga Pagesangan dan juga menyediakan tempat berjualan bagi para PKL di sekitar Masjid Al Akbar. Untuk menempati lahan ini sejak awal, Ibu Rumiati, Ketua Paguyuban PKL Makmur Pagesangan, telah mengajukan izin kepada Pemerintah Kota Surabaya, namun tidak ada jawaban. Dengan ketiadaan jawaban tersebut, maka Ibu Rumiati mengambil kesimpulan bahwa juga tidak ada larangan untuk menempati lahan tersebut bagi PKL. Terlebih tanah tersebut digunakan sebagai sarana penghidupan bagi warga Surabaya serta tidak dibangun apalagi dijual. Selain itu pihak Pengurus Paguyuban juga memungut uang pendaftaran, yang jumlahnya saat ini untuk orang yang baru mencapai satu juta rupiah yang pembayarannya bisa diangsur. Namun masalah uang pendaftaran ini tampaknya disembunyikan oleh Ketua Paguyuban PKL Makmur, Ibu Siti Rumiati, karena dalam keterangannya, para PKL tidak dipungut biaya pendaftaran, dan dipungut biaya retribusi setiap harinya.

Terkait dengan syarat keharusan warga Surabaya, tidak seperti di sentra PKL

Gayungan yang dengan ketat menerapkan aturan bahwa yang berjualan harus warga Surabaya, PKL yang berjualan di lahan Pemkot utara Masjid Al Akbar tidak semuanya orang Surabaya, namun ketika mendaftar tetap menggunakan KTP Surabaya yang dipinjam dari saudara maupun kerabatnya. Sedangkan dalam kegiatan operasional kesehariannya, pengurus Paguyuban PKL Makmur Pagesangan memungut iuran kebersihan dan keamanan sebesar tiga ribu rupiah serta uang listrik yang jumlah bervariasi tergantung pemakaian dari para PKL anggotanya.

Saat ini jumlah PKL yang menjadi anggota Paguyuban PKL Makmur Pagesangan ini telah mencapai sekitar 600 orang, yaitu sekitar 100 orang lebih berjualan di malam hari dan sisanya merupakan PKL yang berjualan pada Minggu pagi. Adapun PKL yang berjualan di Minggu pagi tersebut, sebagian besar merupakan PKL yang setiap harinya, pada malam hari, berjualan di area Markas Kodam V Brawijaya.

Para PKL yang menjadi obyek penelitian ini, secara umum memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Dari lima orang informan yang diwawancarai peneliti, satu orang diantaranya, yaitu Ibu Lastri, merupakan lulusan SD, satu orang lulusan SLTP, yaitu Bapak Brodin, dua orang

lulusan setingkat SLTA, yaitu Bapak Rakidin dan Ibu Anik, sedangkan satu orang yang terakhir, yaitu Bapak Budi, menyelesaikan pendidikan Sarjana S1.

Secara umum para informan yang diteliti telah lama menjadi pedagang kaki lima (PKL) ini. Diketahui hanya satu orang saja, yaitu Bapak Brodin, yang belum sampai lima tahun menjadi PKL, setelah sebelumnya menjadi pedagang di pasar Mangga Dua Jagir. Sedang informan lainnya telah lebih dari lima tahun menjadi PKL dan bahkan salah satunya telah lebih dari sepuluh tahun menjadi PKL, yaitu Bapak Rakidin.

Salah seorang informan, yaitu Bapak Brodin, meskipun sama-sama menjadi pedagang awalnya justru berdagang di pasar sebelum akhirnya memilih menjadi PKL di area Masjid Al Akbar karena menurutnya menjadi PKL menjanjikan penghasilan yang lebih besar. Selain terdapat hanya dua orang langsung sejak awal bekerja langsung memilih menjadi PKL, yaitu Ibu Lastri dan Ibu Anik. Sementara dua orang lainnya, yaitu Bapak Rakidin dan Bapak Budi sebelumnya pernah bekerja di sektor formal dengan menjadi karyawan perusahaan. Namun kedua orang di atas, memiliki alasan yang berbeda terkait keputusannya untuk menjadi PKL. Bapak Rakidin memutuskan menjadi PKL dengan pertimbangan bahwa dengan

usianya saat itu sudah tidak memungkinkan baginya untuk kembali bekerja di pabrik, sehingga dia memutuskan untuk menjadi PKL. Berbeda dengan Bapak Rakidin yang terkesan terpaksa menjadi PKL karena tidak memungkinkan kembali ke pabrik karena faktor usia, Bapak Budi memilih menjadi PKL karena profesi ini justru dianggapnya lebih baik dari profesi sebelumnya sebagai sales di sebuah perusahaan.

Selanjutnya, dari kelima informan tersebut, tiga orang diantaranya dapat dikatakan sebagai PKL “asli” area Masjid Al Akbar, karena sejak awal memang telah berada di area tersebut sebelum adanya pembukaan lahan kosong sisi utara masjid untuk PKL oleh warga Pagesangan. Ketiga orang tersebut adalah Bapak Rakidin, Ibu Lastri dan Ibu Anik. Namun mereka tidak langsung berjualan di lahan kosong milik Pemkot tersebut, melainkan di area yang lebih dekat di sekitar Masjid Al Akbar, karena memang tempat yang saat ini belum digunakan untuk berjualan para PKL. Meski demikian, dari ketiganya juga terdapat perbedaan, karena ternyata Pak Rakidin ketika masih di area Al Akbar merupakan anggota PKL binaan manajemen Masjid Al Akbar. Sementara kedua orang lainnya merupakan PKL “liar” yang berjualan di pinggir jalan sekitar masjid Al Akbar sehingga seringkali ditertibkan oleh aparat.

Adapun dua informan yang lain, yaitu Bapak Brodin dan Bapak Budi sejak awal masuk ke area Al Akbar langsung menempati lahan kosong milik Pemkot yang dikelola Paguyuban PKL Makmur Pagesangan. Selain itu kedua orang ini sebelumnya telah berjualan di lokasi lain. Persamaannya antara keduanya bahwa kepindahan ke lokasi Al Akbar tersebut dilakukan atas informasi temannya.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa para informan yang diteliti memiliki perjalanan usaha yang berbeda-beda sebelum akhirnya sama-sama menjadi PKL anggota Paguyuban PKL Makmur Surabaya. Ada di antaranya yang sejak awal memang menjadi PKL dan ada juga yang sebelumnya bekerja di sektor formal. Selain itu juga tidak semuanya sejak awal memang telah berjualan di area Al Akbar, bahkan sebelum adanya pembukaan lahan kosong milik Pemkot untuk berjualan oleh warga Pagesangan, melainkan ada juga yang baru masuk setelahnya, sehingga sejak masuk area sekitar Al Akbar langsung berjualan di lokasi tersebut.

Faktor Yang Mendorong Untuk Berjualan Di Lahan Kosong Di Sisi Utara Masjid

Seperti diketahui, lahan kosong milik Pemkot yang diamanahkan pada Masjid Al Akbar disisi utara masjid, baru dibuka

untuk berjualan PKL oleh warga Pagesangan sekitar pada tahun 2010. Jadi baru sekitar empat tahun para PKL anggota Paguyuban PKL Makmur tersebut berjualan di lokasi tersebut. Keterangan yang diberikan para PKL sesuai dengan adanya surat surat edaran yang dikeluarkan Kecamatan Jambangan bernomor 300/06/436.11.9/2011 tertanggal 7 Januari. Surat itu berisi pemberitahuan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di utara MAS dan PKL harian, mulai 16 Januari dilarang berjualan di lokasi tersebut. Sementara menurut pedagang pada saat itu telah ada peringatan dari petugas sebulan sebelumnya (www.surabayapagi.com, 2011). Dari berita tersebut dapat diketahui bahwa PKL di lahan kosong sebelah utara Masjid Al Akbar tersebut telah ada sejak 2010.

Dari keterangan sebelumnya diketahui bahwa beberapa informan telah lama berjualan di sekitar Al Akbar, bahkan ada yang memang menjadi PKL binaan manajemen Masjid Al Akbar. Namun sejak dibukanya lahan kosong di sisi utara masjid tersebut, mereka memilih untuk pindah berjualan di lokasi tersebut. Hal ini tentu didasari oleh berbagai alasan yang menurut mereka akan lebih menguntungkan. Faktor yang mendorong mereka untuk berjualan di lahan kosong di sisi utara Masjid Al Akbar tersebut antara lain adalah karena adanya pembubaran PKL yang di area masjid

dengan alasan bahwa area masjid harus bersih dari PKL.

Alasan lain yang diungkapkan oleh PKL adalah masalah kenyamanan dan keamanan, tanpa takut adanya penertiban dari aparat dibandingkan bila mereka masih berjualan di jalan. Masalah keamanan tersebut, menurut para PKL, disebabkan karena adanya pengelola yang selama ini memberikan jaminan kepada mereka. Berikutnya adalah karena menurut mereka tempat tersebut lebih rame dibandingkan di tempat jualan mereka sebelumnya, dan iuran yang harus dibayarkan juga murah.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong PKL untuk memilih berjualan di lahan kosong milik Pemkot di sisi utara Masjid Al Akbar adalah faktor kenyamanan karena tempat yang luas, dan faktor keamanan karena ada jaminan dari pengelolanya. Selain itu juga karena mereka merasa bahwa berjualan ditempat tersebut lebih ramai dibanding tempat sebelumnya dan juga iuran yang murah. Bahkan sejak berdirinya sentra PKL di lokasi tersebut Masjid, banyak pedagang yang boyongan dari depan masjid, yang dikelola oleh manajemen masjid. Mereka memilih bergabung ke Paguyuban PKL Makmur Pagesangan karena tempatnya lebih nyaman (surabayakita.com, 2011).

Masalah Yang Dihadapi PKL Anggota Paguyuban PKL Makmur Pagesangan

Sejak awal menempati lahan kosong di sisi utara Masjid Al Akbar para PKL telah seringkali mendapatkan banyak masalah seperti pengusiran yang dilakukan oleh Camat Jambangan lama, yaitu Bapak Nono Indriyatno. Ironisnya tindakan Camat Jambangan lama tersebut justru mendapat dukungan dari LKMK Jambangan. LKMK tampaknya tidak peduli dengan nasib para PKL dan berencana mengambil alih paksa pengelolaan PKL, namun mengurungkan niatnya. Hal ini, didasarkan pada pertimbangan, tak ingin terjadi kisruh di lapangan (www.surabayapagi.com, 2011).

Selanjutnya dalam perjalanannya, keberadaan para PKL juga seringkali dipermasalahkan oleh pihak manajemen masjid. Awalnya hal ini didasari oleh adanya perebutan pengelolaan PKL di lahan kosong tersebut. Pada awal 2011, pasar minggu yang digelar di area lapangan masjid diperebutkan dua pihak, yakni pengelola lama yang bernaung di bawah PKLLM (PKL Lapangan Masjid), serta pihak Paguyuban PKL Makmur bentukan LKMK Pagesangan.

Menurut manajemen, pihaknya tidak pernah memberikan izin penggunaan lahan tersebut kepada Paguyuban PKL Makmur Pagesangan. Paguyuban PKL Makmur Pagesangan Surabaya, yang biasa berjualan

di area tersebut mengajukan surat izin untuk berjualan ke manajemen MAS No 003/P2KLM/II/2011 tertanggal 1 Februari 2011. Namun pihak manajemen MAS melalui surat No 34/E/01-MAS/II/2011 menyatakan keberatan atas rencana pedagang sebelum ada izin resmi dari Walikota Tri Rismaharini. (news.detik.com, 2011). Sementara pihak Paguyuban PKL Makmur Pagesangan merasa tidak ada larangan atas tindakan mereka menempati lahan tersebut karena tidak adanya penolakan pihak Pemkot atas ijin penggunaan lahan yang mereka ajukan.

Karenanya perbedaan pandangan tersebut, pada bulan Januari 2011, pihak sempat membuat pagar seng setinggi 2 meter agar lahan tersebut tidak lagi. Akibatnya para pedagang melakukan pengebolan pagar tersebut. Sebelum kejadian, para pedagang telah mendatangi kantor Kecamatan Jambangan, namun pihaknya tidak mengetahui hasil pertemuan pihak kecamatan dan pedagang. Para pedagang yang berjumlah 15 orang memaksa masuk dan mendirikan tenda-tenda dagangannya, dengan cara menjebol pintu masuk bagian selatan dan utara. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan pihak manajemen Masjid Al Akbar ke Polsek Jambangan (news.detik.com, 2011).

Konflik yang berujung pada pelaporan kepada pihak kepolisian oleh

manajemen Masjid Al Akbar tersebut bukan hanya terjadi sekali. Pada tanggal 8 Juni 2011, Direktur Utama Masjid Al Akbar Surabaya kembali membuat laporan ke Polrestabes Surabaya. Yang dilaporkan adalah para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di belakang MAS (PKL Makmur Pagesangan). Laporan itu disebutkan jika para PKL ini telah mengganggu kekhusukan beribadah bagi jamaah MAS (surabayakita.com, 2011). Sering adanya pelaporan ini dibenarkan oleh Ibu Siti Rumiati.

Sekitar bulan April 2013 lahan kosong milik Pemkot Surabaya ini juga pernah dipersoalkan. Kala itu berdalih turut menjaga asset pemkot Surabaya, manajemen Masjid Al Akbar Surabaya memasang papan pengumuman di lahan kosong milik pemkot Surabaya yang berisi bahwa lahan tersebut telah di amanatkan ke manajemen Masjid Al Akbar. Paguyuban PKL bereaksi sehingga persoalannya menjadi ricuh bahkan sampai Polrestabes turun tangan untuk menjadi mediator (suarapubliknews.net, 2014). Papan pengumuman ini kembali dipasang pada bulan April 2014, dengan tulisan Tanah Milik Pemkot Surabaya DALAM AMANAT Masjid Nasional Al Akbar Surabaya Berdasarkan Denah Dinas Tata Kota Surabaya no 188/PI/PTSK/1995. Ternyata keberadaan papan pengumuman

ini tidak diketahui oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan setempat yang notabene sebagai kepanjangan tangan Pemkot Surabaya (www.beritalima.com, 2014).

Yang terbaru pada bulan November 2014 kemarin, manajemen Masjid Al Akbar Surabaya memasang gembok besar di pintu pagar yang menjadi pintu masuk ke lahan yang biasa dipakai untuk berjualan para PKL anggota Paguyuban PKL Makmur Pagesangan. Tidak hanya mengunci pintu masuk ke lahan kosong yang selama ini digunakan sebagai tempat mengais rejeki para PKL ini, manajemen MAS bahkan memasang tulisan berupa peringatan yang ditujukan ke para PKL tersebut. Peringatan itu berbunyi: PERINGATAN !!!! Barang Siapa Merusak Kunci/Gembok Akan Diancam Hukuman Pidana.

Pintu ini akhirnya dirusak oleh pihak yang diketahui, meskipun tuduhan diarahkan kepada Pengurus Paguyuban PKL Makmur Pagesangan. Namun Ketua Paguyuban PKL Makmur Pagesangan, justru menuduh balik bahwa pihak manajemen sendirilah yang merusak pintu tersebut dan menyalahkan orang lain. Namun terkait dengan berbagai permasalahan tersebut, para PKL umumnya tidak mau ambil pusing dan menyerahkan semuanya kepada ketua Paguyuban PKL Makmur Pagesangan, Ibu Siti Rumiati.

Strategi Adaptasi PKL Anggota Paguyuban PKL Makmur Pagesangan Untuk Tetap Dapat Berjualan Di Area Sekitar Masjid Al Akbar

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dan bisa tetap bertahan di lokasi berjualan di lahan kosong sisi utara masjid, berbagai strategi telah diterapkan oleh para PKL anggota Paguyuban PKL Makmur Pagesangan, khususnya oleh pihak pengurusnya. Dari PKL sendiri salah satu cara yang dilakukan tentunya adalah dengan ngotot mempertahankan jualannya ketika ada pihak yang mengusirnya, seperti yang dilakukan Pak Rakidin, waktu awal-awal berjualan di lokasi tersebut.

Pihak Paguyuban PKL Makmur Pagesangan juga selalu berusaha berinteraksi dengan manajemen Masjid Al Akbar untuk mencari pemecahan masalah yang terjadi. Sayangnya, interaksi tersebut, meskipun ada juga jarang terjadi. Padahal dari pihak Paguyuban PKL Makmur Pagesangan berharap, bahwa setiap kali ada masalah, pihaknya bisa dipanggil untuk diajak berkomunikasi

Selain dari pengurus, pihak PKL dari Paguyuban PKL Makmur Pagesangan, juga hampir tidak ada yang berinteraksi langsung dengan manajemen. Dari seluruh informan hanya satu orang yang mengaku ikut pertemuan dengan pihak manajemen

Masjid maupun pihak lainnya, yaitu Pak Rakidin. Selain Pak Rakidin, PKL lainnya mengaku tidak pernah berinteraksi langsung dengan pihak manajemen.

Menurut Vayda dan Rappaport dalam Mulyadi (2007) yang dikutip oleh Sugihardjo, dkk., (2012), adaptasi manusia dapat dilihat secara fungsional dan prosesusual. Adaptasi fungsional merupakan respons suatu organisme atau sistem yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi stabil (homostatis). Sejak awal berjualan di lahan kosong sisi utara masjid, PKL telah mendapat tekanan dari berbagai pihak, khususnya dari kecamatan Jambangan bersama dengan Satpol PP. Kondisi ini menyebabkan munculnya respon bagi para PKL dan upaya untuk mengadaptasikan diri terhadap masalah tersebut. Mereka melakukan perlawanan terhadap upaya penertiban aparat dengan ngotot mempertahankan dagangannya. Terlebih bagi mereka, keberadaan lahan yang dimiliki Pemkot adalah lahan milik umum yang digunakan untuk kebutuhan semua orang, dan mereka yakin juga berhak menempati lahan tersebut selama lahan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pemerintah kota.

Sedangkan adaptasi prosesusual merupakan sistem tingkah laku yang dibentuk sebagai akibat dari proses penyesuaian manusia terhadap perubahan-

perubahan lingkungan disekitarnya. Ketika dalam prosesnya, aktivitas berjualan para PKL terus menerus diganggu dengan berbagai tindakan manajemen Masjid Al Akbar, para PKL juga terus berusaha melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik manajemen Masjid Al Akbar, maupun dengan pihak kepolisian dan pemerintah, yang dalam hal ini adalah Camat Jambangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi, dengan tujuan utama bahwa para PKL akan tetap dapat terus berjualan di lahan kosong milik Pemkot tersebut.

Strategi adaptasi lain, dilakukan dengan menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan sosial yang telah membentuk suatu jaringan sosial. Jaringan sosial yang dimaksud dalam hal ini adalah Paguyuban PKL Makmur Pagesangan, yang memang sejak awal mengelola para PKL yang berjualan di lahan kosong milik Pemkot di sisi utara Masjid Al Akbar. Dengan berbagai alasan, seperti pertemanan, kekerabatan dan sebagainya, kemudian membuat para PKL bersama-sama bergabung dan menjadi anggota Paguyuban PKL Makmur. Dalam prakteknya, jaringan sosial ini merupakan strategi adaptasi yang paling efektif dari para PKL untuk tetap berjualan di lahan

tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa hampir semua penyelesaian dari permasalahan yang ada diserahkan sepenuhnya oleh para PKL kepada pengurus Paguyuban PKL Makmur.

Hubungan Antara PKL Anggota Paguyuban PKL Makmur Pagesangan Dan Pihak Manajemen Masjid Al Akbar Pada Saat Ini

Setelah seringkali berbenturan, saat ini sudah terdapat pengertian antara pihak manajemen Masjid Al Akbar dengan para PKL yang tergabung dalam Paguyuban PKL Makmur Pagesangan. Hal ini berarti bahwa pihak manajemen tidak lagi mempermasalahkan penempatan lahan kosong tersebut oleh para PKL. Hal ini juga didukung dengan pernyataan manajemen yang dimuat di media. Hendro Dirut Manajemen Masjid Al Akbar Surabaya saat dikonfirmasi media mengatakan, manajemen Masjid Al Akbar Surabaya tidak mempermasalahkan para PKL untuk berdagang di lahan kosong samping Masjid Al Akbar Surabaya. Bahkan, kepada para pedagang yang biasa berdagang di lahan tersebut, diminta untuk tetap melakukan aktivitasnya itu (surabayaupdate.com, 2014).

Hanya saja seperti yang sudah berjalan selama ini, PKL harus libur ketika lahan tersebut dibutuhkan untuk parkir bila

pada waktu-waktu tertentu lahan parkir di dekat Masjid Al Akbar tidak mencukupi. Bahkan menurut Bapak Rakidin sebenarnya ada wacana dari Pemkot untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai sentra PKL terbesar se Surabaya, namun rencana tersebut ditolak manajemen karena kebutuhan lahan parkir tersebut. Meski begitu pihak Ketua Paguyuban PKL Makmur Pagesangan sendiri juga menyatakan bahwa mereka cukup tahu diri untuk libur ketika memang lahan tersebut dibutuhkan.

Dengan demikian tampaknya segala permasalahan terkait penggunaan lahan kosong milik Pemkot di sisi utara Masjid Al Akbar tersebut sudah dapat sudah dapat diselesaikan oleh semua pihak yang terkait. Hal ini terjadi karena sudah terbukanya komunikasi setelah adanya pertemuan yang dilakukan antara pihak manajemen dengan pengelola PKL Makmur Pagesangan, yang juga dihadiri dari pihak Kecamatan Jambangan dan juga Polrestabas.

SIMPULAN

Sebagai salah satu tujuan wisata religi di Surabaya, Masjid Al Akbar Surabaya yang selalu ramai pengunjung, menarik minat banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area masjid tersebut. Awalnya, para PKL bahkan berjualan di area sekitar masjid dan berada di bawah pengelolaan langsung manajemen Masjid

Al Akbar Surabaya. Namun seiring berjalannya waktu, banyak juga para PKL yang berjualan di luar pengelolaan Manajemen masjid Al Akbar Surabaya, salah satunya adalah kelompok PKL yang berjualan di lahan kosong seluas 10.962 meter persegi yang berada 200 meter di sebelah utara Masjid Al Akbar Surabaya. Kelompok PKL tersebut dikelola oleh warga Pagesangan dalam wadah Paguyuban PKL Makmur Pagesangan.

Dalam perjalanannya, keberadaan Paguyuban PKL Makmur Pagesangan yang menempati lahan Pemkot ini mengalami banyak sekali permasalahan, utamanya terkait dengan status lahan milik Pemkot yang diamanatkan kepada Masjid Al Akbar Surabaya tersebut. Berbagai masalah tersebut ini ditengarai sebagai upaya manajemen untuk merebut pengelolaan PKL di lahan tersebut yang dipegang oleh warga Paguyuban PKL Makmur Pagesangan. Karena sejak adanya PKL tersebut, tempat ini selalu ramai dan mampu mengundang banyak pengunjung. Bahkan sejak berdirinya sentra PKL di lokasi tersebut Masjid, banyak pedagang yang pindah dari depan masjid, yang dikelola oleh manajemen masjid. Mereka memilih bergabung ke Paguyuban PKL Makmur Pagesangan karena tempatnya lebih nyaman.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dan bisa tetap bertahan di lokasi berjualan di lahan kosong sisi utara masjid, strategi yang diterapkan oleh para PKL anggota Paguyuban PKL Makmur Pagesangan salah satunya adalah dengan melakukan perlawanan, dengan ngotot mempertahankan dagangannya, dengan menjebol pagar seng yang dipasang, maupun dengan memindahkan pintu yang digembok tanpa merusak gembok yang dipasang. Strategi adaptasi lain, dilakukan dengan menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan sosial yang telah membentuk suatu jaringan sosial. Jaringan sosial ini merupakan strategi adaptasi yang paling efektif dari para PKL untuk tetap berjualan di lahan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa hampir semua penyelesaian dari permasalahan yang ada diserahkan sepenuhnya oleh para PKL kepada pengurus Paguyuban PKL Makmur.

Saat ini sudah terdapat pengertian antara pihak manajemen Masjid Al Akbar dengan para PKL yang tergabung dalam Paguyuban PKL Makmur Pagesangan. Pihak manajemen tidak lagi mempermasalahkan penempatan lahan kosong tersebut oleh para PKL. Hanya saja seperti yang sudah berjalan selama ini, PKL harus libur ketika lahan tersebut dibutuhkan untuk parkir bila pada waktu-waktu tertentu

lahan parkir di dekat Masjid Al Akbar tidak mencukupi. Meski begitu pihak Ketua Paguyuban PKL Makmur Pagesangan sendiri juga menyatakan bahwa mereka cukup tahu diri untuk libur ketika memang lahan tersebut dibutuhkan.

Daftar Pustaka

- Alisyahbana. 2005. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.
- Fachrina, Rama Yani and Damsar. 2010 *Jaringan Sosial Dalam Masyarakat Nelayan (Studi terhadap Keluarga Nelayan Miskin di Desa Pasir Baru Kec. Sungai Limau). Project Report*. Lembaga Penelitian Universitas Andalas
- Gerungan. 1991. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.
- Kaplan, David. 2002. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniadi, Tri dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2001. *Ketertiban Umum & Pedagang Kaki Lima Di DKI Jakarta : Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik
- Manning, Chris dan Effendi, Tadjuddin Noer. 1991. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Maryatmo, R. dan Susilo, YS. 1996. *Kumpulan Tulisan Dari Masalah Usaha Kecil Sampai Masalah Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Safaria, Anne Friday; Dadi Suhandi dan Selly Riawanti. 2003. *Hubungan Perburuhan Di Sektor informal*. Bandung: Yayasan AKATIGA.

Sugihardjo, Eny Lestari, Agung Wibowo. 2012. Strategi Bertahan Dan Strategi Adaptasi Petani Samin Terhadap Dunia Luar (Petani Samin Di Kaki Pegunungan Kendeng Di Sukolilo Kabupaten Pati). *SEPA*. Vol. 8 No. 2 Februari 2012. Hal 51 – 182.

Suriatmi. 2005. *Perdagangan Kaki Lima Sebagai Dampak Sosial Dari Peningkatan Jumlah Pengangguran Di Kota Bogor*. Simposium Riset

Ekonomi II Surabaya, 23-24 November 2005

Sumber Internet:

Camat Jambangan Usir Pedagang MAS. Senin, 10 Jan 2011. <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Camat-Jambangan-Usir-Pedagang-MAS;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a73fe4f41b7a76e61338eb66786c384d> (diakses 9 September 2014)

Haryono, Aan. 80.568 warga Surabaya masih pengangguran. <http://ekbis.sindonews.com/read/763561/34/80-568-warga-surabaya-masih-pengangguran-1374398927> (diakses 9 September 2014)

Jajeli, Rois. Lahan Parkir Masjid Al Akbar Diserobot PKL, Polisi Diam Saja. Rabu, 02 Februari 2011. <http://news.detik.com/surabaya/read/2011/02/02/121724/1558852/466/la-han-parkir-masjid-al-akbar-diserobot-pkl-polisi-diam-saja> (diakses 6 Mei 2014)

Manajemen Masjid Al-Akbar Kembali Usik PKL Pagesangan. Senin, 03 November 2014. <http://suarapubliknews.net/index.php/peristiwa-6/item/2595-manajemen-masjid-al-akbar-kembali-usik-pkl-pagesangan> (diakses 2 Desember 2014)

Manajemen Masjid Al Akbar Surabaya Arogan. 4 Oktober 2011. <http://surabayaupdate.com/manajemen-masjid-al-akbar-surabaya-arogan/> (diakses 2 Desember 2014)

Redaksi Surabayakita. *PKL Masjid Al Akbar Dilaporkan Ke Polisi*. Rabu, 08 Juni 2011 http://surabayakita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2653:pkl-masjid-al-akbar-dilaporkan-ke-polisi&catid=25&Itemid=2. (diakses 5 Oktober 2014)